

# IDENTIFIKASI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN WONOSOBO)

Nanang Agus Suyono<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sains Al Qur'an

<sup>a</sup> Email : suyono.na07@gmail.com

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel :

Diterima : 18 Agustus 2016

Disetujui : 27 Agustus 2016

### Kata Kunci :

Pemahaman Akuntansi,  
Pemanfaatan Sistem Informasi  
Akuntansi, Peran Internal Audit,  
Sumber Daya Manusia Bidang  
Akuntansi dan Kualitas Laporan  
Keuangan Pemerintah Daerah.

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (2) pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (3) pengaruh peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (4) pengaruh sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilaksanakan pada SKPD Pemerintah kabupaten Wonosobo dengan sampel sebanyak 77 orang pada kepala bagian akuntansi/penatausahaan keuangan dan staf bagian akuntansi diambil secara *purposive sampling*. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda untuk menganalisis data kualitatif dan kuantitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 2) Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 3) Peran internal audit tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. 4) Sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan dan menunjukkan arah negatif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## ARTICLE INFO

### Riwayat Artikel :

Received : August 18, 2016

Accepted : August 27, 2016

### Keywords:

*Understanding of accounting, accounting information system utilization, the role of internal audit, human resources, accounting and financial reporting quality of local government*

## ABSTRACT

*A This study aims to determine: (1) Effect of accounting understanding of the quality of local government financial reports. (2) The effect of the use of financial accounting information system on the quality of local government financial reports. (3) the effect of the role of internal audit to the quality of local government financial reports. (4) the effect on the quality of human resources of local government financial reports.*

*The research was conducted on SKPD Wonosobo district government with a sample of 77 people at the head of the accounting / financial administration and accounting department staff with purposive sampling. The analysis tool used is multiple linear regression to analyze qualitative and quantitative data.*

*The results showed that: 1) Understanding of accounting significant effect on the quality of local government financial reports. 2) Utilization of accounting information systems significantly influence the quality of local government financial reports. 3) The role of internal audit and showed no significant effect on the quality of the negative direction of local government financial reports. 4) Human resources not significant and shows the negative direction on the quality of local government financial reports.*

## 1. PENDAHULUAN

Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih mendalam. Banyak kasus-kasus buruk yang terjadi berkaitan dengan kualitas laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah serta sistem pengendalian internal pemerintah yang buruk. Selain itu kompetensi dari para pegawai akuntansi pemerintah yang masih rendah juga dapat memberikan dampak yang buruk bagi kualitas laporan keuangan pemerintah. Adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan perlu ditingkatkan untuk menaikkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Yuliani dkk, 2010).

Adanya kepatuhan terhadap standar akuntansi dan sistem informasi akuntansi yang baik dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan suatu standar untuk menyesuaikan baik dalam bentuk maupun isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah harus berpedoman kepada SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Sistem akuntansi yang andal dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah mencakup prosedur dan tahapan yang mesti diikuti dalam mencatat data keuangan kemudian langkah berikutnya mengolah data tersebut untuk digunakan oleh pihak internal maupun eksternal dalam rangka mengambil keputusan (Mahmudi, 2007).

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi dari Pemerintahan menyebutkan akuntansi sebagai suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah serta menyajikan data, mencatat transaksi apapun yang berhubungan dengan keuangan sehingga informasi yang didapat tersebut digunakan oleh orang yang berkompeten dengan informasi tersebut. Penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah diperlukan adanya suatu pedoman berupa SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan). Pelaksanaan APBN dan APBD pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan pemerintah berisi neraca, laporan arus kas serta laporan realisasi anggaran yang mengacu atau berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Untuk dapat menghasilkan laporan berkualitas selain harus mengacu kepada standar atau pedoman hal yang perlu diperhatikan adalah kompetensi sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang dimaksud merupakan pegawai atau karyawan yang mampu memahami proses serta pelaksanaan akuntansi sesuai dengan ketentuan berlaku. (Diani, 2009).

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan selain itu adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi mutlak diperlukan untuk dapat menunjang proses kecepatan, keefisienan dan keefektifan dalam mengolah data akuntansi. Masyarakat luas serta berbagai pihak telah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh SKPD. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan Sistem informasi yang digunakan oleh SKPD. Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah

data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Dengan adanya SIKD dapat mempercepat kinerja pemerintah serta masyarakat dapat memanfaatkannya informasi tersebut dengan lebih komprehensif (Ahmad, 2008).

Internal audit juga ikut berperan dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas proses pelaksanaan dan pelaporan akuntansi dapat diberikan jaminan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Penilaian yang sistematis dan objektif yang dilaksanakan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam suatu organisasi merupakan pengertian dari internal audit. Selain memberikan jaminan bahwa pelaksanaan dan pelaporan akuntansi sesuai standar peran lain dari auditor internal adalah memberikan jasa konsultasi laporan keuangan pemerintah daerah (Diani, 2009).

Untuk menghasilkan pengelolaan laporan keuangan yang baik pegawai SKPD harus memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi serta mengikuti pelatihan dan pengalaman dalam bidang akuntansi (Warisno, 2008). Sistem akuntansi membutuhkan untuk menerapkan hal tersebut. Pemahaman logika akuntansi yang baik akan didapatkan oleh sumber daya yang memiliki kriteria tersebut. Kekurangan pemahaman terhadap logika akuntansi dapat berdampak pada kekeliruan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan serta

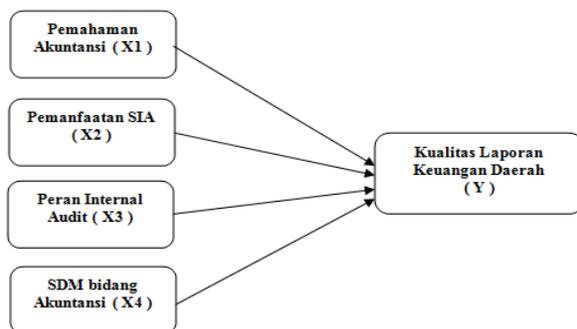
adanya ketidaksesuaian terhadap prinsip atau standar yang berlaku. Roviyantje (2011) Penggabungan dari berbagai bidang disiplin dalam ilmu akuntansi akan menghasilkan laporan keuangan. Sehingga untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan seorang yang memiliki kompetensi dalam bidangnya. Laporan keuangan pemerintah yang berkualitas juga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi pemahaman dalam bidang akuntansi pemerintah serta organisasi pemerintah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Yuliani dkk (2010). Perbedaan penelitian Yuliani dkk (2010) dengan penelitian ini adalah penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu sumber daya manusia bidang akuntansi dengan harapan agar penelitian ini lebih luas cakupannya. Selain itu, responden pada penelitian ini juga berbeda dengan responden dari penelitian Yuliani dkk (2010) dimana respondennya adalah para pegawai dan staf bagian akuntansi di lingkungan pemerintah kota Banda Aceh, sedangkan responden penelitian ini adalah Kepala Bagian Akuntansi dan Staf Bagian Akuntansi pada pemerintah yang bekerja di Kabupaten Wonosobo.

Pemilihan SKPD Kabupaten Wonosobo sebagai objek penelitian karena pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun 2006 sampai dengan 2014 Kabupaten Wonosobo mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) padahal opini yang diharapkan oleh organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Karena masih adanya perubahan metode pencatatan dari *single entry* menjadi *double entry* yang masih dipraktekkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten

Wonosobo dimana belum sepenuhnya dapat menerapkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Pelaporan Keuangan yang artinya belum mampu menyusun laporan keuangan dalam bentuk realisasi anggaran, neraca, arus kas maupun catatan atas laporan keuangan. Diterbitkannya opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dikarenakan juga adanya temuan bahwa laporan keuangan belum disusun dengan metode akrual basis secara penuh. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual menurut PP 71 tahun 2010 adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

**2. KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**



Gambar.2.1. Kerangka Pemikiran

Suatu proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan disebut sebagai Pemahaman. Sehingga orang yang pandai dan mengerti benar tentang akuntansi adalah orang yang memiliki pemahaman akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan bahwa seseorang

dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan. Sehingga bisa dikatakan semakin baik seseorang dalam memahami akuntansi maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah yang disajikan. (Poerwadarminta, 2006).

Laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh disiplin atau bidang ilmu akuntansi menurut Roviyantri (2011). Untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas maka dibutuhkan para pegawai yang memahami ilmu tentang akuntansi dan memiliki kompetensi dalam akuntansi pemerintah.

Memahami ilmu akuntansi akan membantu dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian Diani (2012) yang menjelaskan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah di daerah kota Pariaman.

Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas seseorang harus bisa mengerti dan memahami bagaimana proses dan pelaksanaan akuntansi itu dijalankan sesuai dengan pedoman yang berlaku. Sehingga orang yang menjalankan aktivitas tersebut harus menjadi perhatian utama hal ini disampaikan oleh Yuliani dkk (2010) pada penelitian di Pemerintah Kota Banda Aceh. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik, berkualitas, cepat dan akurat pada pemerintah pusat dan daerah maka pemerintah juga harus bisa mengembangkan dan

memanfaatkan kemajuan teknologi informasi hal ini disampaikan oleh Ahmad (2008). Undang-undang nomor 33 tahun 2004 mendukung adanya sistem informasi keuangan daerah yang diselenggarakan secara nasional.

Memanfaatan SIKD yang dapat mempercepat proses kerja dalam pengelolaan keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan daerah yang berkualitas hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan sebagai bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah. (Fikri, 2011). Yuliani dkk (2010) yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Banda Aceh. Penelitian lain yang sejalan yakni penelitian Astuti (2011) yang membuktikan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Kualitas laporan keuangan dalam pemerintah daerah dapat ditingkatkan apabila sistem informasi akuntansi keuangan daerah dapat dimanfaatkan dengan maksimal oleh masing-masing SKPD. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H2: Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sari (2010) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik juga didukung oleh peran dari inspektorat karena organisasi / kegiatan ketika dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar harus diawasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan Peranan inspektorat yang semakin baik dalam memberikan pengawasan maka akan semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Hal ini didukung dari penelitian Yuliani dkk (2010) yang

membuktikan bahwa peranan dari internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Banda Aceh.

Penelitian lain yang sejalan yakni penelitian yang dilakukan oleh Diani (2014) yang menyatakan bahwa peranan dari inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota Pariaman. Nilai informasi yang dipengaruhi oleh inspektorat sebagai internal audit akan memiliki keandalan. Meningkatnya kualitas laporan keuangan daerah juga karena adanya masukan dari inspektorat dalam proses meriview yang akan menuntun terwujudnya laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Penelitian lain yang sejalan yakni penelitian Yenita (2010) yang menjelaskan bahwa peran inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah kota Padang.

Inspektorat sebagai internal audit dapat mempengaruhi laporan keuangan yang memiliki keandalan. Semakin baik inspektorat dalam melakukan pengawasan maka akan semakin berkualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

H3 : Peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Latar belakang dari pendidikan akuntansi, adanya keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengalaman dalam bidang keuangan akan dapat menghasilkan pengelolaan laporan keuangan daerah yang baik. Oleh karena

itu sumber daya manusia dalam bidang akuntansi harus dimiliki masing-masing SKPD. Kualitas laporan keuangan yang baik dihasilkan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi (Warisno, 2008).

Sumber daya manusia dalam bidang keuangan yang akan mempermudah dalam pelaksanaan fungsi akuntansi sebagai salah satu elemen yang sangat penting dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas hal ini dinyatakan oleh Fontanella (2010).

Kompetensi sumber daya manusia dalam memahami akuntansi secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang dinyatakan dalam Penelitian Roviyantje (2011). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menjelaskan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, namun penelitian tersebut tidak berhasil membuktikan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka disusun hipotesis sebagai berikut:

H4 : Sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### 3. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mengetahui kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan cara tertentu berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada, kemudian mencari kembali faktor yang diduga menjadi penyebabnya. Hal ini dilakukan melalui pengumpulan data dengan melakukan

perbandingan diantara data yang diteliti (Sumarni dan Wahyuni, 2006) Maka penelitian ini menggunakan metode kausal komparatif.

Seluruh pegawai yang ada pada SKPD di lingkungan Pemerintah Wonosobo merupakan populasi dalam penelitian ini. Sedangkan model pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Kriterianya terdiri dari kepala bagian akuntansi/penatausahaan keuangan yang disebut Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, dan staf bagian akuntansi yang disebut Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang bekerja di SKPD Wonosobo berjumlah 48 SKPD yang terdiri dari 1 Inspektorat, 1 Sekretariat Dewan, 1 Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro, 9 Bagian, 4 Badan, 7 Dinas, 9 Kantor, 1 Satuan, 15 Kecamatan. Sebanyak 2 orang yang ditetapkan responden tiap SKPD. Jadi jumlah responden sebanyak 96 responden dari 48 SKPD.

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Persamaannya adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

- Y : Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- a : Nilai konstan
- b<sub>1</sub>-b<sub>4</sub> : Koefisien arah regresi
- X<sub>1</sub> : Pemahaman akuntansi
- X<sub>2</sub> : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah
- X<sub>3</sub> : Peran internal audit
- X<sub>4</sub> : Sumber daya manusia bidang akuntansi

e : error.

#### 4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

##### A. Analisis Data

##### 1. Analisa Regresi Berganda

Analisis regresi ganda dilakukan untuk menguji hipotesis yang hasilnya disajikan pada tabel 4.1.

Variabel	Nilai Koefisien	Sig.	Hasil
Pemahaman Akuntansi	0,019	0,787	Tidak Signifikan
Pemanfaatan SIA	0,518	0,000	Signifikan
Peran Internal Audit	-0,022	0,808	Tidak Signifikan
SDM Bidang Akuntansi	-0,041	0,587	Tidak Signifikan

Sumber : Data primer diolah, 2016

Berdasarkan hasil olahan data regresi dengan menggunakan program komputerisasi SPSS versi 16, maka dapat disajikan persamaan regresi yaitu sebagai berikut :

$$Y = 17.282 + 0.019X1 + 0.518X2 - 0.022X3 - 0.041X4 + 1.618$$

Penjelasan persamaan regresi adalah sebagai berikut :

- a. Nilai konstanta a = 17.282, bernilai positif artinya apabila pemahaman akuntansi (X1), pemanfaatan sistem informasi akuntansi (X2), peran internal audit (X3), sumber daya manusia (X4) dalam keadaan konstan atau 0, maka laporan keuangan SKPD yang menjadi sampel dalam penelitian ini berkualitas.
- b. (b1) (Koefisien regresi X1) = 0,019 bernilai positif dan memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka pemahaman akuntansi tidak mempunyai pemerintah pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

- c. (b2) (Koefisien regresi X2) = 0,518 bernilai positif artinya pemanfaatan sistem informasi akuntansi akan berdampak pada penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih berkualitas. Dengan asumsi variabel-variabel lain dianggap konstan.
- d. (b3) (Koefisien regresi X3) = -0,022 bernilai negatif dan memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka peran internal audit tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- e. (b4) (Koefisien regresi X4) = -0,041 bernilai negatif dan memiliki tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka sumber daya manusia bidang akuntansi tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

##### B. Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

##### 1. Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasar pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.

Variabel pemahaman akuntansi memberikan nilai koefisien regresi 0,019 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,787 (sig > 0,05). Temuan ini tidak mendukung hasil penelitian Yuliani dkk (2010) yang menyatakan adanya pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, temuan ini mendukung hasil penelitian Enho (2008) dan Rajana (2009) yang menyatakan variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H1 yang menyatakan pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ditolak.

Ditolaknya hipotesis pertama ini disebabkan karena pada kenyataan di pemerintahan kabupaten Wonosobo masih mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan dan ketepatan data yang telah diinput yang kurang baik. Dalam wawancara dengan Joko Susilo, S.E., (Kasubag Akuntansi) bagian keuangan Setda, beliau mengungkapkan bahwa masih sangat terbatas staf yang memiliki pemahaman akuntansi. Ketika direkrut menjadi staf akuntansi mereka belum memiliki pemahaman akuntansi. Karakteristik dari setiap transaksi dan pengaruhnya terhadap akuntansi laporan keuangan harus bisa dipahami oleh Staf akuntansi. Bila tidak mampu menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan bukti laporan keuangan yang disampekan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan maka tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas meskipun pegawainya memiliki pemahaman terhadap akuntansi.

## 2. Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel pemanfaatan sistem informasi akuntansi memberikan nilai koefisien regresi 0,518 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 ( $\text{sig} < 0,05$ ). Didukung penelitian Andriyani (2010) yang menyatakan adanya hubungan yang signifikan positif antara pemanfaatan sistem informasi akuntansi dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H2 yang menyatakan pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, diterima.

Standar akuntansi keuangan pemerintah merupakan pedoman dalam pemanfaatan sistem informasi

akuntansi keuangan pemerintah daerah. Bapak Joko Susilo, S.E., (Kasubag Akuntansi) bagian keuangan Setda mengungkapkan bahwa di Kabupaten Wonosobo sudah menerapkan SIKD yaitu bagian dari sistem informasi manajemen pemerintah daerah yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan.

## 3. Peran Internal Audit terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa peran internal audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel peran internal audit memberikan nilai koefisien regresi -0,022 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,808 ( $\text{sig} > 0,05$ ). Tidak didukung penelitian dari Yuliani (2010), yang menyatakan bahwa peran internal audit berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Tetapi, mendukung hasil penelitian Choirunisah (2008) yang menyatakan peran internal audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan masih banyaknya temuan BPK terhadap LKPD mengenai permasalahan terkait kelemahan peran internal audit. Dengan demikian H3 yang menyatakan peran internal audit berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ditolak.

Ditolaknya hipotesis ketiga ini disebabkan karena beberapa masalah yang dialami Inspektorat Kabupaten Wonosobo mengemban tugas, pokok dan fungsinya dalam pemeriksaan keseluruhan SKPD yang terkait dengan aset. Adanya masalah yang dihadapi staf terkait pengelolaan aset tetap tidak bisa diturunkan dengan adanya rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal. Opini yang diharapkan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak bisa dilepaskan dalam hal aset tetap yang merupakan masalah terpenting. Bupati / walikota sebagai kepala pemerintah daerah tertinggi juga

mesti mendukung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Dalam wawancara dengan Bapak Drs. Agus Kristiono, M.Si (Sekretaris) Inspektorat Kabupaten Wonosobo beliau mengungkapkan masih banyak pegawai kabupaten Wonosobo yang kurang memahami akuntansi atas pengauditan laporan keuangan yang belum disusun dengan metode akrual basis secara penuh. Dengan demikian peran internal audit belum sepenuhnya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

#### **4. Sumber Daya Manusia Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Variabel sumber daya manusia memberikan nilai koefisien regresi -0,041 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,587 ( $\text{sig} > 0,05$ ). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Windiastuti (2009) yang menyatakan ada hubungan positif antara sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ponamon (2013) yang menyatakan variabel sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian H4 yang menyatakan sumber daya manusia bidang akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, ditolak.

Kondisi sumber daya manusia di subbagian akuntansi/tata usaha keuangan yang belum mendukung sebagai penyebab ditolaknya hipotesis keempat. Hal ini bisa terjadi karena dari pemerintah pusat yang terlalu seringnya mengganti dengan peraturan baru, banyaknya aturan pemerintah yang tumpang tindih serta batas waktu penyerahan laporan keuangan yang begitu ketat. Untuk menghasilkan

laporan keuangan yang berkualitas dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi. Kinerja organisasi yang baik akan didukung oleh sumber daya manusia yang baik pula dan pelaporan keuangannya yang telah tersaji secara andal dan tepat waktu merupakan salah satu indikator pengukuran baiknya kinerja organisasi.

## **5. PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukandapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman akuntansi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo (H1 ditolak). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pegawai pemerintah mempunyai pemahaman akuntansi namun jika tidak mampu menyajikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan bukti laporan keuangan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan yang dilaporkan maka tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
2. Pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo (H2 diterima). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi akuntansi keuangan daerah yang sudah diterapkan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Peran internal audit tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo (H3 ditolak). Hal ini disebabkan karena internal auditor dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi belum maksimal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas.

4. Sumber daya manusia bidang akuntansi tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Wonosobo (H4 ditolak). Kekeliruan dalam laporan keuangan yang dibuat serta adanya ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah disebabkan kemampuan sumber daya manusia bidang akuntansi dalam pekerjaannya belum kompeten.

#### 4.2. Saran

Saran dari peneliti berdasar pembahasan diatas ::

1. Pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, peran internal audit, dan sumber daya manusia bidang akuntansi menunjukkan kategori baik, namun pejabat pemerintah kabupaten Wonosobo harus lebih mengoptimalkan lagi dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemerintah Kabupaten Wonosobo diharapkan menerima pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi agar dapat meningkatkan kualifikasi di bidang pendidikan. Agar pencapaian tujuan organisasi lebih berhasil dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas.
3. Untuk dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuannya hendaknya peran internal audit dapat terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Wiwik. 2010. Pengaruh kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal akuntansi Vol 5 No 1*.
- Choirunisah, Fariziah. 2008. Factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan sistem akuntansi instansi. *Tesis maksi UGM, Yogyakarta [ID]*.
- Fontanella, Amy. 2010. Analisis pengaruh latar belakang pendidikan dan pengetahuan akuntansi pengguna terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. *Dalam jurnal akuntansi & manajemen, 22-30*.
- Mahmudi. 2007. Analisis laporan keuangan pemerintah daerah: Panduan bagi eksekutif, DPRD, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Poerwadarminta. 2006. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Edisi Ketiga. Balai Pustaka.

- [Permen] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (www.google.com) [30/5/2014]
- [PP] Peraturan pemerintah No 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP tahun 2005).
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Tentang Perangkat Daerah. Melalui (www.google.com) [29/5/2014]
- [PP] Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (SAP 2010).
- [PP] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja. Penerbit Departemen Keuangan Republik Indonesia..
- Roviyantie, D. 2011. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. *Skripsi*. Universitas Siliwangi..
- Sekaran, Uma. 2003. *Research Methods For Business: A Skill-Building Approach*. John Wiley and Sons Inc, New York [US].
- Sumarni dan Wahyuni. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta [ID]: Andi Offset.
- Warisno. 2008. "Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi". *Tesis Universitas Sumatra Utara*, Medan.
- Windiastuti, R. 2009. Pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*.
- Winidyaningrum, Celviana dan Rahmawati. 2010. Pengaruh sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan variabel intervening pengendalian intern akuntansi. *Jurnal SNA X111*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- [UU] Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Yang Mensyaratkan Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD.
- [UU] Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

[UU] Undang-undang Nomor 5 Tahun  
2011 Tentang Akuntan Publik. Institut  
Akuntansi Indonesia  
(www.google.com) [11/5/2015] .